

# PENERIMAAN INFORMASI DAMPAK PENAMBANGAN PASIR BAGI KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP DI KALANGAN PENAMBANG PASIR ILEGAL DI DAS JENEBERANG KABUPATEN GOWA

**Marini, Sumbangan Baja, Iqbal Sultan**

*Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin*

## Abstract

*illegal mining has been disturbing residents, its consequences such as damage to buildings , damage to land and as well as the threat of landslides . This study aims to determine how the process of receiving information in the sand miners on the impact of mining activities on the environment in the watershed Jeneberang Gowa . The method used in this research is descriptive qualitative , observation and interviews with respondents directly to key informants consisting of 6 -party BLHD Gowa and 2 representatives of the illegal miners who are still active and is no longer active . Selects respondents intentionally ( purposive ) with predetermined criteria . Data were analyzed based on the Elaboration Likelihood Theory of Richard Petty and John T. Cacioppo . Based on the research results , admission information among miners became a boomerang attributed to the weak argument given the BLHD . Weak arguments given to the audience with high motivation in elaborating the message will turn on the rejection message is given so persuasive attitude change is difficult to achieve . This study suggests that the delivery of information about environmental damage through persuasive message carried Regional Environmental Agency to the miners do not achieve the goal of changing the behavior of the miners to stop illegal mining and the need to take into account the credibility of the communicator and the audience trust the communicator, as well as strength message in the process of providing information.*

*Keywords : effective communication; illegal sand miners; elaboration likelihood theory*

## Abstrak

Maraknya pertambangan ilegal yang menggunakan mesin pompa telah meresahkan warga akan akibat yang ditimbulkannya seperti kerusakan bangunan, kerusakan lahan dan lahan serta ancaman longsor. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses penerimaan informasi di kalangan penambang pasir tentang dampak aktivitas penambangan bagi lingkungan hidup di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Kualitatif, dengan melakukan observasi dan wawancara responden secara langsung kepada informan kunci yang terdiri dari 6 pihak BLHD Kabupaten Gowa dan 2 perwakilan penambang ilegal yang masih aktif dan sudah tidak aktif. Pemilihan responden dilakukan secara sengaja (purposive) dengan kriteria yang telah ditetapkan. Data dianalisis berlandaskan Teori Elaborasi Likelihood dari Ricard Petty dan John T Cacioppo. Berdasarkan hasil penelitian, penerimaan informasi di kalangan penambang menjadi boomerang diakibatkan lemahnya argumentasi yang diberikan pihak BLHD. Argumentasi lemah yang diberikan kepada audiens dengan motivasi tinggi dalam mengelaborasi pesan akan berbalik pada penolakan pesan persuasif yang diberikan sehingga perubahan sikap sulit dicapai. Dari penelitian ini disimpulkan bahwa penyampaian informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan hidup melalui pesan persuasif yang dilakukan Badan Lingkungan Hidup Daerah kepada pihak penambang tidak mencapai tujuan yakni mengubah perilaku penambang untuk berhenti menambang secara ilegal serta perlunya memperhatikan faktor kredibilitas komunikator dan kepercayaan audiens kepada komunikator, maupun kekuatan pesan dalam proses pemberian informasi.

Kata Kunci : komunikasi efektif; penambang pasir ilegal; teori elaborasi kemungkinan

## PENDAHULUAN

Meningkatnya jumlah penduduk di suatu daerah kerap mendorong peningkatan kebutuhan terhadap sandang, pangan, papan, air bersih dan energi. Hal ini mengakibatkan terjadinya eksploitasi yang tinggi terhadap sumber daya alam yang cenderung mengabaikan aspek-aspek kelestarian lingkungan hidup (Purnama, 2013). Lingkungan sangat menderita akibat eksploitasi sumber daya alam yang melampaui daya dukung (Salim, 2010). Anggapan bahwa lingkungan itu milik publik, menyebabkan orang pada umumnya tidak merasa bersalah mengeksploitasi sebesar-besarnya sumber daya alam dan membuang limbah ke media lingkungan (Hadi, 2006)

Penambangan yang dilakukan oleh manusia merupakan usaha untuk maksud pemenuhan kebutuhan hidupnya. Hanya saja, proses penambangan yang dilakukan selama ini, cenderung menjadi usaha eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan yang pada akhirnya berdampak negatif bagi kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Salah satu yang marak saat ini adalah pertambangan tanpa izin. Kegiatan pertambangan mengakibatkan berbagai perubahan lingkungan, antara lain perubahan bentang alam, perubahan habitat flora dan fauna, perubahan struktur tanah, perubahan pola aliran air permukaan dan air tanah dan sebagainya. Dalam penelitiannya (Dyahwanti, 2007) yang mengangkat tema tentang “ **Dampak Kegiatan Penambangan Mineral Bukan Logam Di Kota Semarang (Studi Kasus Kecamatan Ngaliyan)**” mengatakan perubahan-perubahan tersebut menimbulkan dampak dengan intensitas dan sifat yang bervariasi. Selain perubahan pada lingkungan fisik, pertambangan juga mengakibatkan perubahan kehidupan sosial, budaya dan ekonomi.

Menurut pada mulanya pertambangan tanpa izin (PETI) di hampir sebagian besar wilayah Negara Indonesia dilakukan oleh perorangan atau kelompok orang, sebagai usaha tambahan/ sampingan di daerah-daerah yang diyakini berpotensi mengandung bahan galian intan, emas dan timah. Kebutuhan ekonomi yang makin meningkat dan hasil usaha tambang yang diperkirakan dapat memberikan harapan kehidupan lebih baik, membuat pelaku-pelaku penambangan mengalihkan usaha sekunder ini menjadi usaha utama (Herman, 2006).

Di Kabupaten Gowa, tambang mineral bukan logam merupakan salah satu sumber PAD terbesar. Luas areal tambang mineral bukan logam seluas 271 ha yang terdapat di Kecamatan Bontomarannu, Kecamatan Pallangga, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Pattalassang, Kecamatan Parangloe, dan Kecamatan Manuju (Karim dkk; 2012).

Berdasarkan data dari dinas pertambangan energi dan mineral kabupaten Gowa terdapat 23 titik lokasi penambangan pasir ilegal yang masih menggunakan pompa/ mesin sedot. Kerusakan lingkungan dan bencana akan terus mengancam jika aktivitas ini terus dilakukan bahkan akan semakin meningkat besaran dan intensitasnya jika tidak dilakukan upaya pengelolaan dan pengendalian lingkungan yang berkelanjutan.

Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup di (PPLH) Badan Lingkungan Hidup Daerah (BLHD) Kabupaten Gowa dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa telah memberikan penyuluhan tentang dampak kerusakan lingkungan akibat aktivitas yang dilakukan penambang pasir di wilayah tersebut, namun tetap saja kegiatan penambangan terus dilakukan. Jalur komunikasi yang ditempuh berupa pertemuan langsung dengan warga dinilai belum efektif. Bahkan tindakan dari aparat

kepolisian yang berulang kali menyita peralatan penambang belum juga memberi efek jera, justru kegiatan tersebut berlangsung hingga saat ini.

Berdasarkan pemaparan diatas maka dilakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui proses penerimaan informasi dan faktor yang menghambat informasi di kalangan penambang pasir tentang dampak aktivitas penambangan pasir mekanis bagi lingkungan hidup di DAS Jeneberang di Kabupaten Gowa.

## METODE PENELITIAN

### *Desain Penelitian*

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan melakukan pengamatan, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dan dokumentasi. Fokus penelitian pada interaksi (proses komunikasi) yang terjadi dalam penyampaian informasi mengenai dampak kerusakan lingkungan akibat pertambangan ilegal antara penambang ilegal dan BLHD Kabupaten Gowa. Menurut sifatnya, data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: data kualitatif, data ini meliputi pesan, argumentasi, respon dan pandangan dari pihak BLHD dan penambang pasir ilegal yang diperoleh melalui sumber data yang bersifat data primer dan data sekunder. Data juga diperoleh melalui kegiatan wawancara untuk menjawab sesuai dengan pengetahuan yang mereka ketahui sehingga akan diperoleh jawaban yang variatif untuk menjawab pertanyaan hal-hal apa saja terkait proses pemberian informasi dan hambatan pemberian informasinya.

### *Teknik Pengambilan Sampel*

Informan penelitian ini dipilih dari dua pihak, dari pihak pemerintah yakni BLHD

dan Dinas Pertambangan dan Energi dipilih secara purposive (sengaja) dengan kriteria informan mereka yang pernah melakukan interaksi dengan penambang pasir ilegal dalam bentuk penyuluhan/sosialisasi. Sementara dari pihak penambang ilegal kriterianya adalah para penambang pasir yang beroperasi di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa, khususnya penambang tanpa ijin (menggunakan pompa / mesin sedot) bersedia menjadi informan, serta pernah mendapatkan informasi dari BLHD Gowa. Disini peneliti mengambil keterwakilan informan dari masing-masing penambang aktif dan penambang yang sudah tidak aktif. Perlu diketahui bahwa isu pertambangan pasir ilegal ini merupakan isu yang sensitif, sehingga pemilihan informan sangat tergantung dari kesediaan pihak penambangannya.

Peneliti melakukan observasi terhadap para partisipan melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi penelitian sehingga peneliti berada di tengah-tengah objek penelitian. Tujuannya untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai aktivitas penambangan ilegal yang terjadi serta bagaimana pemahaman penambang tentang aktivitas yang dilakukannya. Dalam mengumpulkan data dilakukan wawancara mendalam berdasarkan pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelum tanya-jawab berlangsung dengan informan kunci berdasar pada kerangka pikir masalah. Serta dilakukan studi dokumentasi terhadap literatur-literatur lainnya. tentang pendapat, teori-teori yang berhubungan dengan penelitian.

### *Teknik Analisis Data*

Adapun teknik analisis data yang digunakan adalah teknik analisis interaktif Miles dan

Huberman. Menurut Miles dan Huberman (dalam Pawito, 2007) teknik analisis ini pada dasarnya terdiri dari tiga komponen, yaitu reduksi data (data reduction), penyajian data (data display), dan penarikan serta pengujian kesimpulan (drawing and verifying conclusions).

## HASIL

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Jeneberang Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Dengan durasi penelitian yang berlangsung kurang lebih 6 bulan ( Juni – November 2013). Hasil penelitian yang dilakukan ditemukan gambaran sebagai berikut:

### *Pemicu Maraknya Penambangan Pasir Ilegal*

Penambangan pasir dengan mesin pompa isap di Kabupaten Gowa pada umumnya terjadi di daratan yang dulunya merupakan aliran sungai purba. Daratan yang banyak dikeruk permukaannya untuk dijadikan tanah timbunan atau bahan pembuatan batu bata. Pengerukan di daratan ini menyisakan rongga yang berair sehingga tidak bisa lagi ditanami. Masyarakat yang melihat kondisi ini pun ramai-ramai membeli pompa dan melakukan aktivitas pengisapan pasir dengan mesin pompa. Sayangnya aktivitas tersebut justru menambah kerusakan lingkungan. Dari aspek motivasi diketahui penambang ilegal di Kabupaten Gowa menjadikan aktivitas ini sebagai sumber mata pencaharian yang cepat mendatangkan keuntungan. Kepemilikan pribadi penambang atas lahan penambangan pasir membuat penambang berpikir bahwa mereka berhak menggunakan lahan mereka untuk kepentingan mereka sendiri.

Penambangan pasir dengan pompa dinyatakan ilegal karena tidak mengantongi izin dari Dinas Pertambangan dan Energi kabupaten Gowa. Sementara pihak BLHD

menyatakan penggunaan pompa memang dapat berdampak buruk terhadap lingkungan. Saat melakukan penertiban Dinas Pertambangan dan Energi akan menanyakan ke penambang apakah memiliki izin menambang, namun saat penambang mengajukan izin, izin tersebut tidak bisa diterbitkan karena dalam aturan pertambangan tidak diatur soal perizinan tambang dengan mesin pompa. Izin hanya diberikan bagi pengusaha tambang yang menggunakan eskavator. Sementara untuk memiliki eskavator butuh modal besar dan lokasi yang hendak ditambang oleh penambang ilegal ini tidak sesuai dengan eskavator. Hal ini pula yang membuat penambang kembali menyalahkan pemerintah, karena saat akan mengurus izin mereka pun tidak diperbolehkan.

### *Pengetahuan Penambang Pasir Ilegal Tentang Ijin Tambang dan Dampaknya Terhadap Lingkungan*

Adanya sosialisasi dan pengawasan rutin ke penambang yang menyampaikan tentang seluk beluk tambang termasuk aturan perizinan dan dampaknya terhadap lingkungan telah memberikan informasi yang cukup ke penambang ilegal. Dari BLHD, penambang mengetahui bahwasanya penggunaan mesin pompa akan berdampak buruk pada lingkungan. Namun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman mereka selama menambang, pihak penambang beragumen bahwasanya tidak akan terjadi longsor karena selama 3 tahun menambang longsor tidak pernah terjadi. Pihak penambang malah berkata mereka justru telah membuka lapangan pekerjaan.

### *Respon Sosial Adanya Tambang Ilegal*

Adanya pertampangan pasir di sekitar pemukiman membuat masyarakat resah. Mereka umumnya mengkhawatirkan

terjadinya kerusakan infrastruktur seperti jalanan dan bangunan akibat pengisapan pasir dengan pompa. Serta terjadinya longsor akibat runtuhnya dinding-dinding tanah di sekitar pemukiman atau perkebunan mereka. Oleh karena itu masyarakat pun melakukan tindakan dengan melaporkan dan menyampaikan keluhan ke BLHD Kabupaten Gowa. Dari sejumlah surat pengaduan yang disampaikan ke BLHD masyarakat menyebutkan nama-nama pemilik pompa dan fakta-fakta kerusakan yang telah terjadi.

#### *Hambatan Komunikasi Antara Penambang dan Pihak BLHD*

Pada tabel 1 hasil penelitian menunjukkan pada lima responden dari BLHD diketahui tentang pesan yang disampaikan masih berkuat pada informasi seputar aturan dan metode penambangan. Hal ini menunjukkan kekuatan pesan persuasif masih lemah.

Pada tabel 2 pihak BLHD menyatakan hanya melakukan kunjungan ke penambang sekitar 2 kali dalam setahun dan durasi pertemuan hanya sekitar 30 menit hingga satu jam.

Dalam wawancara dan observasi yang dilakukan, diketahui bahwa komunikator yang hadir untuk memberikan informasi ke penambang bukanlah tipe komunikator yang mudah diterima kehadirannya oleh penambang. Hubungan pengawas/aparat pemerintah dengan atributnya sebagai pengawas dan penambang yang ilegal menciptakan situasi yang mendorong kekakuan dan kebakuan komunikasi.

#### *Pengawasan Tambang Pasir BLHD Gowa*

Saat diadakan pengawasan sering terlontar pernyataan-pernyataan dari penambang yang mengindikasikan kecenderungan penambang melakukan rasionalisasi terhadap pertambangan ilegal yang dilakukannya. Alasan-alasan yang sering dilontarkan oleh

penambang dapat dilihat pada tabel 3. Adapun saran-saran yang diberikan oleh pihak BLHD dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Gowa dapat dilihat pada tabel 4.

### PEMBAHASAN

Proses komunikasi antara penambang pasir ilegal dengan pihak BLHD Kabupaten Gowa, dalam penelitian ini ditemukan bahwa pihak penambang pasir ilegal menempuh jalur *central route* dalam menerima pesan yang diberikan oleh pihak BLHD. Sementara pihak BLHD menggunakan tipe *neutral argument* dalam menyampaikan pesan ke pihak penambang ilegal.

Penelitian ini menggunakan pendekatan Teori Elaborasi Likelihood untuk menganalisis data yang diperoleh. Petty dan Cacioppo (1986) (dalam Griffin, 2012) mengatakan bahwa manusia memproses informasi dengan cara yang tidak sama. Ada dua rute pokok bagaimana informasi itu diproses. Jika seseorang memikirkan pesan secara hati-hati, sistematis dan penuh kecermatan, ia mengambil rute sentral (**central route**). Sebaliknya jika seseorang tidak memikirkan isi pesan, tetapi justru memperhatikan isyarat-isyarat dalam kompleks pesan – seperti menarik tidaknya pemberi pesan, maka ia dikatakan memakai rute perifer (**peripheral route**), Petty dan Cacioppo (1986), Haugtvedt dan Petty, (1992) (dalam Hartati, 2012).

Dari tipe dan jalur pesan yang terjadi dalam proses pemberian informasi ini diketahui bahwa penambang pasir ilegal memiliki motivasi yang tinggi dalam mengelaborasi pesan yang diberikan. Penambang mencermati isi pesan persuasif yang coba disampaikan pihak BLHD tentang dampak kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal. Dimana tujuan pemberian informasi ini agar penambang mau berhenti

menambang secara ilegal. Pengalaman dan pengetahuan penambang ilegal tentang realitas di lapangan mampu dikaitkan dengan kebenaran informasi yang disampaikan membuat penambang justru menolak informasi yang disampaikan BLHD. Kelemahan arumentasi pihak BLHD ditujukan kepada penambang yang cukup kritis terhadap informasi membuat komunikasi tidak berjalan efektif. Disamping faktor lain seperti motivasi ekonomi yang kuat, membuat penambang makin resisten terhadap pemberian informasi.

Penelitian ini juga menemukan, salah satu penyebab tidak suksesnya upaya pendekatan ke penambang ilegal karena kurang diperhatikannya aspek-aspek penting dalam komunikasi efektif. Menurut Schram (Effendy, 2007) menampilkan apa yang disebut “the condition of success communication”, yaitu kondisi yang harus dipenuhi jika kita menginginkan agar suatu pesan membangkitkan tanggapan yang kita kehendaki.

Dalam penelitiannya, (Hartati, 2012) mengatakan untuk menyampaikan pesan kepada sasaran kelompok individu dengan motivasi tinggi, hendaknya disusun argument pesan yang meyakinkan dan sangkutkan pesan tersebut dengan kepentingan pribadi penerima pesan. Jika hendak mempersuasi sesuatu —misalnya produk— dengan kualitas yang “kurang begitu meyakinkan” (argumen lemah), jangan mencari sasaran kelompok motivasi tinggi dan hendaknya ditambah kehadiran isyarat perifer (misalnya pembawa pesan, media).

Dalam penelitian ini pihak komunitor (penyampai pesan) yakni pihak BHLHD cenderung mengabaikan aspek kekuatan pesan, intensitas pemberian pesan dan daya tarik komunikator. Walaupun faktor-faktor ini masuk dalam indikator jalur peripheral, namun menarik perhatian penambang ilegal

untuk dapat diajak dalam komunikasi yang lebih persuasif membutuhkan pendekatan dengan cara ini. Meski diketahui, jalur peripheral biasanya tidak berdampak lama (Perbawaningsih, 2012)

## KESIMPULAN

Dalam merespon pesan penambang ilegal mengedepankan ego-involvement yang cukup besar sehingga kebenaran dan fakta akan dampak dari aktivitas penambangan ilegal terhadap lingkungan yang dilakukan tidak diterima baik. Bahkan cenderung melakukan pembelaan atas nama kebutuhan dan sulitnya mencari nafkah selain menambang secara ilegal. Sehingga proses penerimaan informasi tidak lancar dan belum memberikan efek pada perubahan perilaku penambang pasir ilegal. Faktor lain dalam konsep ELT yakni kesempatan (intensitas menerima pesan) memang terlihat dari hasil penelitian ini sangat minim diterima oleh pihak penambang ilegal dari pihak BLHD Kabupaten Gowa. Padahal hal ini menjadi salah satu faktor yang penting dalam proses persuasi.

Pemahaman penambang ilegal tentang informasi dampak penambangan pasir terhadap lingkungan mengalami hambatan disebabkan metode penyampaian pesan kurang memperhatikan prinsip-prinsip komunikasi efektif serta lemahnya argumentasi pihak BLHD dalam mempersuasi penambang. Penggunaan tipe pesan neutral argument harus ditingkatkan ke strong argument.

Beberapa penggabungan pengolahan pesan secara sentral dan perifer nampaknya tetap harus dipertimbangkan oleh pihak komunikator (BLHD), misalnya mempertimbangkan isyarat perifer (pembawa pesan, media) seperti siapa yang dapat diutus untuk memberikan pesan persuasive kepada penambang. Dan bagaimana pesan tersebut disampaikan.

**DAFTAR RUJUKAN**

- Dyahwanti. (2007). *Kajian Dampak Lingkungan Kegiatan Penambangan Pasir Pada Daerah Sabuk Hijau Gunung Sumbing Di Kabupaten Temanggung*. Jurnal. Semarang. Universitas Diponegoro.
- Effendy. (2007). *Ilmu Teori dan Filsafat Komunikasi*. Bandung. Citra Aditya Bakti.
- Griffin. (2012). *A First Look At Communication Theory*. New York. Mc Graw Hill
- Hadi. (2006). *Resolusi Konflik Lingkungan*. Jurnal Lingkungan. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartati. (2012). *Effects of Argument Quality, Need for Cognition and Issue Involvement to The Attitude Toward a Message Given Through Persuasive Communication*. Jurnal Psikologi, Volume 32, No. 2, 92-100. Yogyakarta. Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada.
- Herman. (2006). *Pertambangan Tanpa Izin (PETI) Dan Kemungkinan Alih Status Menjadi Pertambangan Skala Rakyat*. Bandung. Jurnal PSDG – Badan Geologi.
- Karim.dkk. (2012). *Status Lingkungan Hidup Ekoregion Maminasata*. Makassar. PPE Sulawesi dan Maluku.
- Pawito. (2007). *Penelitian Komunikasi Kualitatif*. Yogyakarta. LKiS Pelangi Aksara.
- Perbawaningsih. (2012). *Menyoal Elaboration Likelihood Model (ELM) dan Teori Retorika*. Jurnal Komunikasi, Volume 9, Nomor 1, Juni 2012: 1- 17.
- Purnama. (2013). *Dampak Penambangan Pasir Mekanis Brantas Di Kediri*. Jurnal Universitas Negeri Malang
- Salim. (2010). *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*. Jakarta. Kompas